



**ANUT GRUBYUG: TAKLUKNYA PETANI PADA MOBILISASI PEMBANGUNAN.
Studi Kasus pada Proyek Pengembangan Jarak Pagar Sebagai Sumber Energi Alternatif di
Kecamatan Tepus, Gunungkidul, DI Yogyakarta**

Gunawan

Jurusan Sosiologi dan Antropologi-Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang,
Gd. C7 Lt.1 Sekaran-Gunung pati-Semarang.

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2016
Disetujui Juni 2016
Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

*Jatropha, mobilization, farmers,
construction*

Abstrak

Masyarakat desa khususnya yang tinggal di wilayah dengan kondisi ekologis yang kering dan tandus seringkali menjadi warga yang harus hidup dalam jerat kemiskinan. Kondisi tersebut mendorong munculnya kehendak negara untuk memperbaiki dan mengatur warganya melalui proyek-proyek pembangunan. Atas nama pembangunan, tangan-tangan negara bergerak mengatur warganya dengan tujuan mulia, yaitu meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Melalui kajian terhadap proyek pengembangan tanaman jarak pagar sebagai sumber energi alternatif, maka tulisan ini mencoba mengurai berlangsungnya proyek pengembangan Jarak Pagar yang dijalankan dengan memobilisasi petani telah gagal untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi telah menghasilkan warga yang semakin tidak berdaya karena menjadi *anut grubyuk*, hanya ikut-ikutan dengan yang lain. Keberadaan proyek untuk mengatasi krisis energi telah menjadikan petani masuk dalam dimensi krisis lain yaitu krisis kemandirian sehingga petani selalu berharap dengan proyek-proyek berikutnya. Mereka menyerah secara total tunduk di bawah struktur kekuasaan yang mengatur mereka.

Data untuk tulisan ini dikumpulkan dari penelitian kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.

Abstract

Villagers especially those living in areas where ecological conditions were dry and barren often the people who have to live in poverty. These conditions encourage the emergence of the will of the state to improve and regulate its citizens through development projects. The name of development, the hands move countries regulate its citizens with a noble purpose, namely improving the standard of living and improve people's lives better than ever.

Through the study of the development project Jatropha as an alternative energy source, then this paper tries to parse the ongoing development of the Jatropha project which is run by mobilizing farmers have failed to improve people's lives. The results showed that the mobilization has resulted in an increasingly helpless citizens due to being embraced grubyuk, just went along with the others. The existence of the project to overcome the energy crisis has made farmers fall into another crisis dimension the crisis of

self-reliance so that farmers are always looking forward to the next projects. They surrendered totally subservient to the power structure that governs them.

Data for this paper were collected from qualitative research conducted in the District Tepus, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
goensaja@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat desa khususnya yang tinggal di wilayah dengan kondisi ekologis yang kering dan tandus seringkali menjadi warga yang harus hidup dalam jerat kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat tersebut ditengarai disebabkan adanya keterbatasan dan hambatan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Minimnya sumber daya yang ada terutama lahan pertanian, menjadikan penduduk setempat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya pangan. Hal tersebut terjadi juga di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara umum wilayah di Gunungkidul merupakan wilayah yang kering dengan curah hujan rata-rata 1.954,43 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/tahun. Dalam satu tahun, hujan turun rata-rata tujuh bulan sedangkan lima bulan berikutnya adalah musim kemarau. Pada waktu-waktu tertentu kemarau dapat berlangsung selama enam sampai delapan bulan. Wilayah Gunungkidul bagian selatan, berhadapan langsung dengan samodera Hindia, curah hujannya lebih rendah dibanding wilayah lainnya sehingga menjadi wilayah paling kering dengan kondisi tanah yang didominasi oleh lapisan kartst sehingga kurang subur untuk pertanian. Wilayah ini

selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau. Berdasarkan catatan RPKD tahun 2013, terdapat lahan kritis Seluas 15.611 ha yang berada di wilayah bagian selatan dan tengah.

Kondisi geografis di wilayah selatan yang kering dan tandus, tetap dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk bertani dengan sistem pengolahan lahan tadah hujan. Lahan-lahan pertanian hanya dapat menghasilkan panen sekali dalam setahun dengan tanaman utamanya padi, ketela dan jagung. Lahan bercocok tanam yang tersedia sangat sedikit dengan tingkat produktifitas rendah.

Minimnya sumber daya yang ada menempatkan Gunungkidul sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan catatan BPS tahun 2010. Sebanyak 20% penduduk dari 688,145 orang termasuk dalam kategori miskin. Hal itu disebabkan oleh karakteristik dan kualitas geografis, serta kesuburan tanah yang buruk untuk usaha pertanian (Gunawan; 2014)

Dalam padangan pemerintah (baca: negara), kemiskinan adalah malah yang harus diselesaikan. Warga miskin harus diantarkan dari jurang kemiskinan sehingga hidupnya menjadi lebih sejahtera. Pemerintah harus dapat mewujudkan cita-cita negaranya menjadi negara yang adil, makmur, sentosa. Kondisi ideal itu dicapai

melalui “Pembangunan”. Terminologi pembangunan menjadi sangat populer pada era orde baru. Jika pada era pemerintahan sebelumnya, Soekarno membangun otoritasnya melalui kharisma personal dan menguatkan semangat nasionalisme, maka pada era pemerintahan Soeharto legitimasi kekuasaannya dibangun melalui janji pembangunan ekonomi masa depan.

Pembangunan berkembang menjadi idiologi yang melegitimasi kekuasaan negara untuk mengatur warganya. Atas nama pembangunan, tangan-tangan negara menjalankan kekuasaannya mengatur warganya untuk mengapai tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Warga menjadi target pembangunan yang *manut* dan harus menerima program pembangunan sesuai kehendak pemerintah. Namun pada banyak kasus pembangunan justru turut memunculkan persoalan-persoalan baru yang berkembang dan ikut berperan dalam menciptakan kesenjangan dan pertikaian sosial dewasa ini (Li, 2012: 1).

Dalam konteks relasi kuasa antara negara dan warga seperti yang telah saya singgung di awal, maka tulisan ini ingin menjawab pertanyaan, mengapa petani di Gunungkidul ikut serta dalam penanaman jarak pagar. Padahal tanaman tersebut bukanlah tanaman yang dapat mencukup kebutuhan subsistensi mereka terutama pangan. Dalam konteks petani Gunungkidul pertanyaan ini menjadi relevan karena selama ini pertanian di sana ditujukan untuk memproduksi sumber pangan. Di sisi lain kondisi lahan tanaman pangan yang terbatas

masih harus ditambahi dengan tanaman lain yang non pertanian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya mencoba menerangkan dari relasi kuasa antara negara dengan petani di Gunungkidul dengan menempatkan peristiwa tersebut sebagai praktek kepengaturan negara kepada warganya. Pengembangan tanaman jarak pagar menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintahan (baca: negara) dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan krisis energi fosil.

Penanaman jarak pagar di Gunungkidul sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan krisis dan ketergantungan terhadap energi fosil merupakan bentuk praktik negara dalam mengelola dan mengatur kehidupan warganya sebagai wujud dari kehendak untuk memperbaiki. Kehendak untuk memperbaiki terletak di gelanggang kekuasaan yang oleh Foucault disebut dengan kepengaturan (*governmentality*), yaitu gagasan mengenai relasi kekuasaan yang diimplementasikan untuk menata, mengatur, dan mengendalikan individu-individu atau masyarakat sesuai dengan kehendak penguasa (baca: negara). '*The conduct of conduct*' atau 'pengarahan perilaku' yakni upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikuasai sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk menjamin “kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan, dst.” (Li 2012:9)

Data dalam tulisan ini diperoleh dari penelitian lapangan di Desa Purwodadi, dan Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Provinsi daerah Istimewa

Yogyakarta. Desa tersebut menjadi tempat dilangsungkan proyek penanaman jarak pagar oleh perusahaan dan pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para petani dan penyelenggara proyek untuk melihat sejauh mana keikutsertaan serta interaksi sosial yang terjadi ketika proyek tersebut berlangsung.

JEJAK-JEJAK JARAK PAGAR DI INDONESIA

Jarak pagar (*Jatropha curcas Linn*), konon tanaman ini disebarkan oleh pelaut-pelaut Portugis dari Amerika Tengah dan Mexico melalui Cape Verde kemudian menyebar ke Afrika dan Asia hingga akhirnya banyak tumbuh di wilayah tropis dan sub tropis. Potensinya untuk sumber bahan *biofuel* sudah diketahui sejak lama. Pada perang dunia kedua, jarak pagar sudah digunakan sebagai pengganti bahan bakar mesin diesel di Madagaskar, Benin, dan Cape Verde (Brittaine, 2010). Di Indonesia, pohon jarak kadang hanya disebut dengan “jarak”. Penyebutan itu seringkali menimbulkan salah pengertian karena ada dua jenis pohon jarak yang biasa dikenal, yaitu jarak kepyar atau dikenal dengan sebutan kastor, kaliki (*riniscus communis*) dan jarak pagar (*jatropha curcas Linn*). Jarak pagar juga dikenal sebagai obat. Getahnya yang berwarna putih pada masa lalu lazim digunakan untuk antiseptik, obat luka, dan obat kumur saat gusi berdarah, sedangkan bijinya menjadi obat pencahar yang manjur (Kloppenburg, n/a). Selain itu biji jarak pagar juga dipakai untuk penerangan rumah. Pada dekade ini, jarak pagar pernah menjadi tanaman yang sangat populer di wilayah

Asia, seperti Indonesia, Philipina, dan India, Myanmar serta di Afrika, seperti Mozambique, Kenya, Tanzania, dan Ethiopia. Tanaman ini mulai ditanam secara masif karena bijinya dipromosikan dapat menjadi sumber *biofuel*. Pengembangan tanaman Jarak pagar diharapkan dapat menyelesaikan persoalan klasik di negara dunia ketiga yaitu krisis energi, kemiskinan, dan pengangguran (Amir, 2008). Jarak pagar merupakan tanaman yang dapat tumbuh di lahan yang kering dan tandus. Biji jarak pagar tidak termasuk sebagai tanaman yang dapat dimakan, sehingga penggunaan untuk sumber bahan bakar tidak akan bersaing dengan kebutuhan pangan dan tidak akan mengancam ketahanan pangan.

Sejarah Jarak pagar di Indonesia digolongkan oleh menjadi tiga periode. Pertama terjadi pada masa penjelajahan bangsa sepanyol ke Asia. Periode ke dua adalah saat pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Ketiga pada tahun 1994 sebagai sumber *biofuel* modern (Affif, 2014). Penyebutan tanaman jarak seringkali menimbulkan salah pengertian karena ada dua jenis pohon jarak yang dikenal, yaitu jarak kepyar (*riniscus communis*) yang juga dikenal dengan sebutan kastor, kaliki. Jenis kedua adalah jarak pagar (*jatropha curcas Linn*) yang di beberapa daerah juga dikenal dengan sebutan jarak budeg, jarak gundul, jarak pager, jarak pandak, jarak wates, dan jarak cina. Buah jarak kepyar dapat dimanfaatkan untuk bahan tambahan industri cat vernis, plastik, farmasi, dan kosmetika. Minyak yang dihasilkan tidak cocok digunakan sebagai bahan bakar, tetapi dapat digunakan untuk pelumas.

Di Indonesia, jarak kepyar sudah lebih

dahulu dibudidayakan dari pada jarak pagar. Pada tahun 1880 sebanyak tiga persen dari seluruh areal tanaman palawija khususnya di Jawa, ditanami dengan jarak kepyar untuk memenuhi permintaan pasar di Eropa sebagai akibat sampingan dari perkembangan industri (Boomgaard, 2004:169) Penelusuran Boomgaard menemukan catatan bahwa pada 1834 *bungkil* atau ampas sisa perasan biji jarak lazim digunakan untuk pupuk tanaman pertanian seperti tembakau, bawang, dan sayuran terutama di daerah Banten, Cianjur, Priangan, Dieng, Karesidenan Kedu, Madiun, dan Madura (Boomgaard, 1999)

Penggunaan bahan bakar untuk menjalankan mesin dari bahan-bahan nabati atau tumbuhan diawali oleh Rudolf Christian Karl Diesel pada mesin yang dirancangnya pada tahun 1893. Mesin rancangannya yang sekarang disebut dengan mesin diesel awalnya digerakkan dengan bahan bakar dari minyak kacang. Namun oleh perjalanan waktu bahan bakar fosil menjadi sumber bahan bakarnya. Penggunaan biofuel sebagai alternatif sumber bahan bakar yang menjadi fenomena global di paruh awal tahun 2000 sesungguhnya bukanlah hal baru. Pada skala Global, penggunaan biofuel sudah dilakukan oleh Brazil dan Amerika sejak abad ke-17 dengan memproduksi etanol yang kemudian diikuti dengan produksi biodiesel. Produksi etanol di Brazil mulai meningkat pada tahun 1970an melalui program *Proálcool*. Program ini merupakan program untuk mengatasi peningkatan jumlah import minyak yang mencapai puncaknya tahun 1979 (*Worldwatch Institute, 2007*). Pertumbuhan kebutuhan biofuel baik di Brazil, Amerika, dan Uni

Eropa semakin meningkat pada tahun 2000an, salah satu pemicunya adalah ratifikasi negara-negara di dunia terhadap Protokol Kyoto sebagai upaya dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan Global (Wilkinson, 2009). Salah satu peristiwa penting yang turut mendorong terjadinya ledakan wacana sumber biofuel di tingkat global adalah uji coba yang dilakukan oleh perusahaan otomotif Daimler Chrysler pada tahun 2005. Perusahaan itu melakukan uji coba penggunaan minyak jarak pada mobil produksinya di India. Uji coba tersebut merupakan salah satu bagian dari program pengembangan biofuel berbasis jarak pagar di India.

Di Indonesia pasang surut wacana biofuel berbasis jarak pagar berlangsung dengan cepat. Suraya Affif (2014) melihat bahwa gegap gempitanya pengembangan jarak pagar di Indonesia pada periode 2005-2006 sangat ditentukan oleh adanya hasrat pengembangan teknologi para teknokrat yang bersekutu dengan birokrat dan pemerintah serta wacana global tentang energi hijau yang bertemu dengan ingatan masa lalu pada era kolonial tentang tanaman jarak. Penelitian tentang produksi biofuel dari jarak pagar diawali oleh ITB sejak tahun 1997 dengan dukungan dana dari Mitsubishi Research Institute (Miri) dan New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) dari Jepang. Ketika terjadi krisis energi, pemerintah mulai mengupayakan pengembangan jarak pagar. Setelah dirintis oleh ITB, kemudian diikuti oleh IPB, dan BPPT. Setelah itu berbagai instansi pemerintah dan BUMN mulai ikut terlibat, seperti BPPT, Pertamina, PLN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) serta

pemerintah daerah seperti Pemprov Nusa Tenggara Timur, Pemprov. Nusa Tenggara Barat, Pemkab. Purwakarta dan Pemkab. Indramayu. Saat itulah hiruk pikuk pengembangan jarak pagar dimulai.

Penelusuran melalui sumber media massa yang saya lakukan menunjukkan bahwa apa yang diperbincangan dalam pengembangan jarak pagar juga mengalami perubahan. Pada tahun 2004-2007 perbincangannya didominasi oleh optimisme keberhasilan pengembangan jarak pagar pada waktu yang akan datang sebagai solusi terhadap krisis energi dan kemiskinan. Pemberitaan terkait dengan jarak pagar berisi tentang pencahangan pengembangan jarak pagar baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan luasan yang cukup fantastis. Pabrik-pabrik yang mulai dibangun, keberhasilan yang dicapai dari uji coba penggunaan minyak jarak sebagai bahan bakar. Namun pada tahun 2008 - 2012 pemberitaan tentang jarak pagar berisi tentang hal yang sebaliknya, yaitu dampak buruk bagi kelestarian ekologi, kegagalan dari program pengembangan jarak pagar, ketidakjelasan nasib petani terhadap apa yang diperoleh dari tanaman jarak pagar, hingga kasus-kasus penggelapan dana dan korupsi dana pengembangan jarak pagar.

PERAN NEGARA DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN BIOFUEL

Situasi yang turut mendorong hiruk pikuk wacana industri biofuel di Indonesia pada saat itu adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar dunia yang mencapai \$70 per barel pada tahun 2005.

Akibat dari kenaikan harga tersebut pemerintah Indonesia sempat menaikkan harga BBM di pasaran hingga dua kali pada bulan Maret dan Oktober. Perbincangan untuk mencari energi alternatif selain sumber energi minyak bumi kembali menyeruak karena keinginan untuk untuk menekan jumlah penggunaan minyak bumi yang terus meningkat.

Keberhasilan para teknokrat mengolah biji jarak pagar menjadi bahan bakar semakin menjadikan tanaman Jarak pagar sebagai tanaman yang diandalkan untuk mengatasi persoalan krisis BBM. Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap upaya pengembangan industri minyak jarak pagar. sebagai tindak lanjut dari Instruksi presiden Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain. Pada Bulan Juli tahun 2006 dibentuknya Tim Nasional Pengembangan Bahan bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. Tugas dari tim tersebut adalah menyusun cetak biru dan Peta Jalan (*Road Map*) pengembangan bahan bakar nabati untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan tersebut terkait dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya yaitu terbitnya deklarasi pada bulan Oktober 2005 tentang gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dan krisis BBM melalui penanam jarak pagar sebagai bentuk Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Pada tahun berikutnya pemerintah menetapkan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati biofuel sebagai bahan bakar lain.

Instruksi tersebut ditujukan kepada tigabelas kementerian, gubernur, bupati/walikota agar mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia melalui Mendagri mencanangkan program Desa Mandiri Energi (DME) dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan energi minyak bumi. Konsep Desa mandiri energi adalah mendorong desa-desa miskin dan terisolasi agar dapat menemukan sumber energi alternatif selain minyak bumi untuk mencukupi kebutuhan sumber energinya secara mandiri. Desa-desa yang terpilih untuk program Desa Mandiri Energi kemudian menjadi desa binaan kementerian terkait dan perusahaan swasta.

Jarak pagar semakin populer di kalangan petani yang berada di daerah kering dan tandus. Petani mengetahui Jarak pagar sebagai tanaman yang dapat menjadi sumber bahan bakar, dapat tumbuh di lahan yang tandus dan tidak perlu perawatan intensif. Wilayah-wilayah dengan kondisi tanah tidak subur, curah hujan rendah, dan tidak dapat ditanami tanaman pangan menjadi sasaran untuk areal budidaya tanaman Jarak pagar. Berdasarkan catatan Puslitbangbun (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan), pada tahun 2006 terdapat 14,2 juta ha lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pengembangan jarak pagar. Lahan tersebut adalah lahan yang dikategorikan sebagai lahan yang tidak produktif bagi tanaman petanian khususnya padi dan palawija. Hasil pendataan Tim Departemen Pertanian mencatat bahwa terdapat lahan seluas 49,5

juta ha yang sesuai untuk pengembangan tanaman jarak pagar, tersebar di seluruh Indonesia. (*Mulyani* 2008).

TANGAN-TANGAN YANG BERGERAK ATAS NAMA PEMBANGUNAN

Petani di Gunungkidul sudah sejak lama mengenal jarak pagar. Mereka biasa menjumpai pohon jarak pagar liar yang tumbuh di tempat yang sulit untuk tanaman lainnya hidup. Ketika mendengar kabar bahwa biji jarak pagar laku dijual, dan kebetulan di desa mereka ada yang mengajaknya menanam maka para petani mulai ikut-ikutan menanamnya. Mereka merasa yakin bahwa biji jarak akan tumbuh dengan baik, dan menghasilkan uang karena pohon jarak liar saja bisa tumbuh dengan baik, apalagi kalau ditanam di tempat yang baik dan dirawat.

Model penanaman jarak pagar di Gunungkidul ada dua macam, yaitu model perkebunan monokultur dan tumpangsari. Model perkebunan monokultur dilakukan oleh perusahaan swasta dengan menyewa atau membeli lahan dari masyarakat untuk ditanami jarak pagar. Pengelolaan perkebunan dilakukan oleh tenaga kerja yang dibayar oleh perusahaan. Proyek jarak pagar dari pemerintah juga ada yang menerapkan model tersebut terutama di lahan milik negara untuk membuat demplot untuk menyuplay sumber bibit di berbagai tempat. Model penanaman jarak pagar secara tumpangsari dilakukan oleh masyarakat. Mereka menanam jarak pagar di tepi lahan dan diantara tanaman jati (*tectona grandis*) dan akasia (*Acacia Spec.*), sekaligus sebagai pagar dari tanaman pangan.

Para petani di di Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus mulai menanam jarak karena adanya ajakan dari perusahaan. PT Titan adalah salah satu nama perusahaan yang masih diingat beberapa petani sebagai perusahaan yang memperkenalkan jarak pagar kepada mereka. Perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di Jakarta. Perusahaan tersebut digerakkan oleh pengusaha lokal yang memang memiliki hubungan kerabat, bisnis, dan politik dengan birokrat di Jakarta. Nama perusahaan “Titan” berasal dari singkatan “Titus Bertani”. Titus dikenal sebagai nama pemilik perusahaan tersebut.

Suwage, staf kesra di Desa Sumberwungu, mengisahkan bahwa pada saat proyek jarak pagar berlangsung, dia berperan dalam mendistribusikan biji jarak kepada petani yang berminat menanam jarak pagar. Saat itu dia menjabat sebagai Kaur Kesra di pemerintahan desa. Dia ditunjuk oleh perusahaan menjadi koordinator tingkat desa yang tugasnya adalah mendistribusikan bibit kepada petani. Dia juga menjadi pengumpul untuk pembelian biji jarak pagar dari para petani. Pada saat itu perusahaan berjanji akan membeli bijinya dengan harga Rp. 3000/kg. Janji itu menarik minat petani untuk menanam jarak pagar, apalagi jarak pagar tidak perlu perawatan khusus.

Dengan kondisi geografis gunung-kidul yang berbukit-bukit dengan lapisan karst maka lahan pertanian yang subur sangat terbatas. Lahan banyak dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras, jati (*tectona grandis*), sengon (*Albizia chinensis*), mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan akasia (*Acacia Spec.*). Luasan lahan yang dimiliki masyarakat juga sangat terbatas. Rata-rata petani mengerjakan lahan 1000-1500 m².

Hanya orang-orang tertentu saja yang mengerjakan lahan luas, yaitu para perangkat desa yang mendapatkan lahan garapan berupa tanah *pelungguh/bengkok* sebagai bentuk upah dari jabatan mereka.

Melalui pendekatan personal Suwage mulai mendistribusikan bibit jarak kepada petani yang memiliki lahan yang tidak dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan tanaman keras. Pendekatan dilakukan dengan cara informal yaitu pada saat bertemu dan berbincang-bincang dengan masyarakat. “*Alasmu kana kae mbok ditanami jarak wae, wong isih selo tandurane, suk tak wenehi bibite, sapa ngerti suk payu rak lumayan hasile*”. “hutanmu itu ditanami jarak pagar saja, kan tanamannya masih jarang, besok saya kasih bibitnya, siapa tahu besok laku kan hasilnya lumayan...” demikian yang dia katakan untuk mengajak para petani agar mau menanam jarak pagar. Suwage kemudian mencatat luas lahan yang diajukan oleh petani kemudian mengajukan permohonan bibit ke perusahaan. Selain berupa biji, perusahaan juga memberikan benih jarak pagar yang disemai pada *polybag* dan sudah tumbuh sekitar 30 cm.

Meskipun banyak petani yang mendaftar untuk menanam jarak pagar, namun benih jarak pagar hanya terdistribusikan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua petani kemudian menanam tanaman tersebut karena lahan yang dimiliki terbatas. Orang yang dapat menanam jarak pagar dalam jumlah banyak adalah para perangkat desa karena mereka memiliki akses lahan lebih banyak dibanding masyarakat umum.

Suwage sangat bersemangat menanam jarak. Sebagai staf desa, dia ingin memberi contoh kepada warganya agar ikut menanam

jarak, karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Suwage tidak hanya menanam di lahan miliknya. Dia juga menanam lahan *pelungguh* staf desa lainnya serta tanah kas desa yang tidak dimanfaatkan untuk tanaman pangan atas seijin penggarapnya tanpa menyewa. Dia hanya bilang kalau besok memang ada hasilnya maka akan diperhitungkan bagiannya. Pada saat itu dia mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri hingga lebih dari satu juta rupiah untuk membayar ongkos tenaga kerja penanaman. Bibit jarak yang ditanamnya bukan hanya yang berasal dari perusahaan, tetapi dia juga mencarinya dari biji jarak pagar liar di hutan.

Keikutsertaan petani dalam penanaman jarak disebabkan karena adanya staf perangkat desa yang terlibat di dalamnya. Para petani mengira bahwa proyek tersebut merupakan program pemerintah yang harus didukung. Para petani hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh petani lainnya. Setelah mereka mendaftarkan luas lahan yang akan ditanami jarak pagar, kemudian bibit, pupuk beserta sejumlah insentif untuk ongkos tenaga penanaman akan diterima oleh petani. Tidak ada yang mengontrol apakah bibit itu ditanam dengan baik atau tidak. Dari cerita salah satu petani, memang ada sebagian yang betul-betul menanam bibit yang diterima sesuai dengan yang dianjurkan, namun ada juga yang asal-asalan karena kondisi lahan yang terbatas.

Melihat para petani mulai menanam jarak pagar, Suwage selaku perangkat desa berinisiatif untuk mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah di tingkat kabupaten. Dia kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan satu unit mesin pengepres biji jarak. Usulan itu memuahkan

hasil. Melalui Deperindakop, satu unit mesin pengepres biji jarak ke petani diberikan ke desa. Tujuannya agar petani dapat melakukan pengepresan biji jarak pagar dan mengambil minyaknya. Mesin tersebut diletakkan di belakang balai desa beserta bangunan kecil yang menaunginya.

Setelah jarak pagar tumbuh semakin besar dan mulai berbuah, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Meskipun pohonnya tumbuh dengan baik namun buahnya hanya sedikit, sehingga mereka merasa enggan untuk memanen dan menjualnya. Beberapa petani sempat mengumpulkan biji yang diperoleh ke tempat Suwage sebagai koordinator. Tetapi karena jumlahnya hanya sedikit, perusahaan tidak mau membelinya dengan alasan tidak sebanding dengan biaya pengambilan. Akhirnya petani malas untuk merawat dan memanen biji jarak pagar. Petani berpikir bahwa lebih baik tenaga dan waktunya digunakan untuk mengerjakan hal lain daripada untuk memetik biji jarak pagar. Pada sisi lain, jarak pagar berbuah pada saat intensitas kerja pertanian sedang tinggi, yaitu bersamaan dengan panen jagung. Petani lebih memprioritaskan mengerjakan yang lainnya daripada mengurus jarak pagar. Memanen jarak pagar ternyata cukup memakan waktu kerena untuk memetik buahnya dalam satu tandan harus dipilih mana buah yang sudah tua dan mana yang belum. Tanaman jarak pagar yang masih ada kini kondisinya tidak terawat dan diterlantarkan saja, tidak berbuah bahkan banyak yang kering dan mati. Beberapa yang masih hidup tetap dibiarkan karena dirasa tidak mengganggu tanaman lain. Suwage, sebagai koordinator yang bertugas me-

nampung biji jarak, belum pernah melakukan pembelian dari petani. Akhirnya aktivitas Suwage sebagai koordinator berangsur-angsur menurun hingga berhenti. Mesin pengepres biji jarak yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi akhirnya *mangkrak* di belakang balai desa sebelum sempat digunakan.

Lain cerita dengan yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. Di desa itu penanaman jarak pagar dilakukan oleh pemerintah kabupaten di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun). Proyek tersebut diawali dengan sosialisasi pemerintah kepada warga tentang pentingnya menanam jarak sebagai antisipasi terhadap kebutuhan bahan bakar yang menjadi semakin langka di masa mendatang. Dalam sosialisasi itu juga dijanjikan akan adanya satu harapan untuk menjadi lebih baik yaitu adanya peningkatan kesejahteraan karena adanya sumber ekonomi baru melalui biji jarak pagar yang dihasilkan. Di bawah koordinasi pemerintah desa, para petani dikumpulkan dan dibentuk kelompok-kelompok tani berdasarkan lokasi lahan garapan. Kelompok tani itulah yang kemudian menjadi target proyek penanaman jarak pagar. Dalam pelaksanaannya terdapat 34 kelompok dengan anggota kelompok berkisar antara 30-40 orang. Masing-masing kelompok memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai garis struktural yang menghubungkan dengan ketua kelompok dan pemerintah di tingkat desa.

Masing-masing kelompok bertugas mengkoordinasi kepada anggotanya mengenai berbagai hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Melalui jalur

struktural itulah proyek penanaman jarak pagar dijalankan oleh negara. Inilah yang oleh Foucault disebut dengan “rasionalitas kepengaturan” yaitu upaya merumuskan “jalan paling tepat untuk menata kehidupan manusia” dalam rangka mencapai bukan saja tujuan dogmatik, melainkan “serangkaian hasil akhir yang spesifik” (Li, 2012:11).

Pelaksanaan penanaman jarak pagar sudah dirancang sebelumnya oleh pemerintah dan harus dijalankan oleh petani. Sebelum bibit datang, petani harus sudah menyiapkan lubang tanam sesuai dengan jumlah bibit yang diajukan. Bibit dikirim ke blok lokasi penanaman dalam *polybag*. Bibit tersebut rata-rata sudah tumbuh antara 25-30 cm. Karena lokasi penanaman di bukit-bukit yang tidak dapat dijangkau kendaraan maka bibit hanya diturunkan di suatu tempat yang disepakati, kemudian petani harus memikulnya ke lahan masing-masing. Membawa bibit hingga ke lahan tidaklah mudah. Tanah dalam *polybag* menjadikan beban berat dalam mengangkutnya karena untuk sampai di lahan harus melintasi bukit dan jalan setapak.

Memikul sejumlah bibit itu dirasakan sangat berat oleh petani tetapi mereka tetap patuh melakukannya. Meskipun demikian tetap saja ada resistensi dikalangan sebagian petani. Siswanto bercerita kalau ada di antara mereka ada yang membuang tanah dalam *polybag* ke sungai atau jurang supaya bebannya bawaannya menjadi ringan. Bahkan ada juga yang membuang bibitnya. “*Iha mung wit jarak wae kok ndadak ditandur sak lemahe, marai ngebot-boti le mikul. Dijabut wae rakya urip...*” (“Iha cuma pohon jarak saja kok ditanam beserta tanahnya, menjadikan berat saat dipikul.

Dicabut saja pasti ya tumbuh...”). Ternyata benar, jarak pagar tetap bisa tumbuh meskipun ditanam dari bibit yang sudah dicabut dari *polybag*-nya. Petani yang membuang bibitnya juga tidak mendapatkan sangsi apapun karena ternyata tidak ada pemantauan oleh pengurus kelompok maupun perangkat desa terhadap jumlah bibit yang sudah ditanam.

Selain mendapatkan bibit, petani juga mendapatkan uang insentif untuk pembuatan lubang tanam, pengangkutan, dan penanaman. Selain itu petani masih mendapatkan pupuk untuk pemupukan awal. Giyar, salah seorang petani, mengatakan bahwa besarnya uang insentif adalah Rp. 1000,- per bibit. Saat itu dia menerima uang Rp. 1.250.000. Uang tersebut dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena saat pembuatan lubang tanam dan penanaman dia kerjakan bersama istrinya. Beberapa petani lain berkisah bahwa dia menerima uang hanya sekedar untuk lewat saja karena untuk penanaman harus mencari tenaga upahan karena tidak sanggup dikerjakan sendiri.

Para petani semakin merasa yakin bahwa biji jarak pagar memang menjanjikan hasil yang baik karena di desa itu dibangun unit pengolahan hasil biji jarak pagar. Bangunan didirikan beserta mesin pengolahannya. Para pengurus kelompok juga mengikuti pelatihan untuk mengolah biji jarak menjadi minyak jarak. Uji coba pemrosesan minyak jarak dilakukan atas kerjasama antara pemerintah dengan lembaga penelitian agribisnis Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta. Biji jarak pagar yang digunakan untuk uji coba didatangkan dari tempat lain karena jarak

pagar di desa itu belum berbuah.

Peran staf pemerintah desa rupanya sangat penting dalam menggerakkan masyarakat untuk turut terlibat dalam penanaman jarak pagar. Perusahaan ternyata juga menggunakan siasat yang sama dengan pemerintah untuk mengatur warga. Strategi perusahaan untuk melibatkan staf pemerintah desa seperti Suwage rupanya cukup efektif untuk menarik masyarakat agar mau menanam jarak pagar. Ada dua alasan mengapa pemerintah setempat memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat, yaitu perusahaan dapat mengaburkan kepentingan bisnisnya, karena dengan menggunakan pemerintah setempat maka seolah-olah sebagai program pemerintah yang harus didukung oleh masyarakat, karena program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan. Dengan perusahaan mendapatkan keuntungan karena terbuka akses untuk memperoleh lahan dan tenaga. Alasan yang kedua adalah pandangan masyarakat terhadap perangkat desa sebagai orang yang disegani dan dihormati, sehingga dengan pendekatan personal staf desa dapat mengajak masyarakat agar terlibat dan menanam jarak pagar (Gunawan, 2014).

Dalam perkembangannya proyek penanaman jarak tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Bibit yang ditanam awalnya tumbuh dengan baik, namun buahnya sedikit. Beberapa orang ada yang sempat memanen biji jarak, tetapi hanya mendapatkan 1-2 kg saja sehingga mereka enggan membawanya ke penampung di tingkat desa. Padahal menurut skema proyek, hasil panen biji jarak pagar dibeli and ditampung oleh pengurus kelompok tingkat desa lalu setelah terkumpul akan diproses

menjadi minyak jarak di pabrik yang sudah dibangun. Namun ternyata jarak pagar yang ditanam tidak kunjung berbuah. Padahal dana untuk pembelian biji jarak pagar sudah dianggarkan oleh Dishutbun dan diserahkan kepada kelompok induk di tingkat desa. Namun karena tidak ada biji jarak yang dipanen maka dana tersebut tidak dimanfaatkan. Keberadaan dana tersebut menjadi kasak kusuk dan gosip di antara warga karena tidak jelas keberadaannya saat ini. Bahkan sempat mencuat dalam pemberitaan media massa tentang adanya indikasi korupsi dana tersebut karena digunakan untuk kepentingan pribadi salah satu pengurus kelompok.

ANUT GRUBYUG DALAM RELASI SOSIAL BERKOMUNITAS

Para petani tidak mengetahui dengan pasti asal muasal proyek jarak pagar di desanya. Tiba-tiba saja beberapa petani dikumpulkan di balai desa untuk mendapatkan penjelasan tentang program tersebut. Sebagian besar petani lain hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh petani lainnya. Mereka mendaftarkan luas lahan yang akan ditanami jarak pagar kepada staf desa, kemudian bibit, pupuk beserta sejumlah insentif untuk ongkos tenaga penanaman akan diterima oleh petani. Tidak ada yang mengontrol apakah bibit itu ditanam dengan baik atau tidak. Dari sejumlah petani yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bibit jarak pagar memang ada sebagian petani yang betul-betul menanam bibitnya sesuai dengan yang dianjurkan, namun ada juga yang menanam secara asal-asalan karena kondisi lapisan tanahnya

berbatu sehingga sulit untuk membuat lubang sesuai dengan aturan teknis penanaman.

Siswanto merupakan salah satu petani yang ikut menanam jarak pagar. Ketika menceritakan kembali apa yang dilakukan pada saat itu dia tidak ingat dengan pasti berapa jumlah bibit yang dia terima. Seingat dia lebih dari 1500 bibit. Siswanto hanya ingat jumlah uang insentif yang didapatkan yaitu Rp. 1.500.000. Siswanto bercerita kalau uang yang dia terima digunakan untuk membeli anakan sapi. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk biaya penanaman. Namun karena penanaman dapat dikerjakan bersama istrinya, sehingga uang yang diterimanya dapat digunakan untuk kepentingan yang lain. Namun sebetulnya dia tidak menanam seluruh bibit yang dia terima, dia hanya menanam sebagian saja di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Banyak juga bibit yang sengaja dibuang di sungai, dan ada yang hanya asal tanam saja tidak sesuai dengan anjuran.

Berbeda lagi dengan cerita Pak Rawan. Dia termasuk petani yang dengan sungguh-sungguh menanam bibit yang diterima. Dia mengajukan permohonan bibit sebanyak 1000 batang. Namun karena tanaga kerja dari keluarga tidak mencukupi, penanaman bibit dilakukan dengan menggunakan buruh upahan. Karena berharap memang tanaman tersebut akan dapat memberikan hasil maka Pak Rawan mau mengeluarkan ongkos tambahan untuk membayar buruh. Pak Rawan harus mengeluarkan uang Rp. 600.000 untuk menyediakan makan dan minum para pekerja saat pembuatan lubang dan penanaman.

Mbah Giyar bercerita lain, ketika proyek jarak pagar berlangsung dia ditunjuk

sebagai ketua sub kelompok. Anggota kelompok yang dipimpin Giyar ada 46 orang. Dia bercerita kalau pada saat penanaman mendapatkan ongkos tanam perbatang Rp. 150. Uang insentif penanam yang diterima dipotong iuran Rp. 10.000 per orang untuk kas kelompok dan oleh Giyar disimpan di BRI Bintaos. Jumlah uang yang diperoleh kelompoknya sebanyak Rp. 460.000. uang tersebut sampai saat ini masih tersimpan di BRI kecamatan Tepus. Pada saat proyek berlangsung, Giyar menerima Rp. 1.250,000. Namun uang tersebut habis untuk menyediakan makan dan minum serta membayar upah tenaga kerja. Kebetulan dia hanya menggarap lahan dengan istrinya sehingga harus mencari tenaga kerja tambahan. Tahun pertama Giyar dan juga petani lain masih semangat merawat, memupuk, memangkas, serta menggemburkan tanah atau *ndangir*. Para petani masih bersemangat untuk merawat bahkan pertemuan-pertemuan kelompok dan penyuluhan rutin diadakan. Pertemuan diadakan di bawah pohon jarak, disediakan konsumsi, bahkan setiap orang mendapat uang Rp. 25.000. "*Koyo-koyo pancen bakal ngasilke*" "sepertinya memang akan berhasil" begitu kata Giyar menceritakan kembali kenangan dia waktu proyek berlangsung. Namun setelah tahun kedua ternyata kondisinya mulai tidak jelas. Beberapa anggota kelompoknya mulai mengumpulkan biji hasil panen 1-2 kg ke tempat Giyar, tetapi karena tidak punya uang untuk membelinya dia menghubungi ketua umum di tingkat desa, namun tidak juga diberi uang untuk membeli biji jarak hasil panen anggota kelompok. Akhirnya biji-biji yang dihasilkan hanya ditimbun dibawah

balai-balai di gubugnya yang ada di ladang. Biji jarak pagar itu masih tersimpan hingga kini di dalam karung dengan kondisi sudah rusak.

Mbah Tomejo juga mengalami hal yang sama dengan petani lain, dia sudah merombak jarak yang ditanam sekitar tiga tahun lalu. Pada saat program penanaman jarak pagar masih berjalan, tanaman jaraknya tumbuh subur tetapi buahnya tidak lebat, sehingga untuk memetikanya diperlukan tenaga dan waktu khusus. "*methik woh jarak kuwi mangan tenaga, lan wektu. Nek wis wayahe awoh le methik kudu milehi, trus kudu ngonceki kaya kacang. Kamongko regane mung 1200 per kilo. Nek sekarung polpole mung entuk 5 kilo, duwite entuk 6000. Lha yo ora gathuk, sedino ora cocok karo kangelane.*" (Memetik buah jarak memerlukan tenaga dan waktu. Kalau sudah waktunya berbuah, memetikanya harus dipilih, lalu harus dikupas seperti kacang. Padahal harganya hanya 1200 per kilo, kalau sekarung hanya dapat 5 kolo, uangnya mendapat 6000. Ya tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

Menceritakan pengalaman petani saat ikut dalam program menanam jarak pagar seringkali disampaikan dengan ekspresi jengkel dan olok-olok. Para petani yang pada waktu lalu menanam jarak pagar merasa apa yang sudah dilakukannya sebagai hal yang aneh, karena mereka sendiri juga tidak menyadari apa yang membuat mereka menjadi sangat bersemangat untuk menanam jarak pagar, serta memiliki harapan akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Ketika menceritakan kembali saat mereka menanam jarak pagar mereka merasa heran, mengapa dulu mau saja ikut-

ikutan menanam padahal mereka harus mengangkut bibit jarak yang letaknya ditanah lapang di bawah bukit dan harus memikul bibit dalam *polybag* ke lahannya yang berada di atas bukit. Padahal jalur jalannya cukup terjal. “*Coba saiki dibayar seket ewu durung karuan saguh nek kon mikul bibit jarak saka Mudal nganti tekan Plemahan*” “sekarang dibayar limapuluh ribu saja belum belum tentu mau kalau disuruh memikul bibit jarak dari Mudal sampai Plemahan” demikian kata pak Rawan ketika menceritakan kembali pengalamannya.

Setelah program penanaman jarak pagar tersebut tidak menghasilkan seperti yang diharapkan, kini petani merasa aneh dengan apa yang sudah dilakukannya di kala itu. Apa yang menjadikan mereka mengikuti saja apa yang dilakukan oleh orang lain, terlebih lagi ajakan itu adalah menanam tanaman yang sebelumnya sama sekali tidak termasuk dalam tanaman yang dibudidayakan dan diharapkan hasilnya.

Keanehan sebetulnya sudah dirasakan oleh pak Suryanto sejak awal petani diajak untuk menanam jarak pagar. Pak Suryanto termasuk petani yang menggarap tanah AB. Selain sebagai petani, pak Suryanto juga menjadi seorang *blantik*, yaitu pedagang hewan ternak yang melayani jual beli ternak di desanya. Ketika awal mula petani diajak untuk menanam dia merasa aneh, mengapa orang-orang mau menanam jarak, padahal hasilnya belum jelas. Bagi Pak Suryanto lahan yang digunakan untuk menanam jarak pagar lebih baik ditanami dengan tanaman lain, seperti lamtoro atau turi. Kerena kedua tanaman tersebut daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak. Karena pertimbangan

itu maka Pak Suryanto tidak menanam jarak pagar, dia menggunakan lahannya untuk ditanami tanaman yang daunnya bisa untuk pakan ternak. Karena ketersediaan pakan ternak menjadi penting baginya sebagai seorang *blantik*. Namun ketika semaikn banyak petani yang menanam jarak pagar, akhirnya pak Suryanto terbujuk dan ikut menanam juga. “*Kulo niku jane mboten pingin melu nandur jarak, nanging mergo kegawa kiwo tengene akhire dadi melu nandur, ndilalah kok ya ora ngasilke*” saya itu sebetulnya tidak minat untuk ikut menanam jarak tetapi karena terpengaruh orang-orang di kanan kirinya akhirnya ikut menanam juga, ternyata tidak ada hasilnya” pengaruh petani lain menjadikan pak Suryanto ikut menanam jarak pagar di lahannya. Dia ikut menanam karena sering kali saat berinteraksi dengan petani lain merasa sebagai orang yang berbeda dengan yang lain, sehingga dia merasa *ora pada kancane* (tidak seperti tetangganya). Perasaan itu menjadikan dia merasa terlepas dari relasi sosial dengan petani yang lain. Ketika tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh petani yang lain maka ada merasa aneh. Tentu saja merasa aneh karena ada relasi sosial yang terputus, ketika dalam perbincangan sehari-hari petani lain membicarakan jarak pagar, maka dirinya tidak dapat terlibat dalam obrolan itu. Kemudian muncul keraguan pada apa yang diyakini di awal. Sebagai sesama petani sebaiknya melakukan seperti yang dilakukan oleh petani lainnya (*podho kancane*) “*aku melu nandur jarak podo karo kancane, nek pancen hasil ya ben melu ngrasakke hasile panen jarak, tapi nek gagal, ya ora gagal dewekan*” (saya ikut menanam jarak agar

seperti petani lain, kalau berhasil ya supaya ikut merasakan seperti petani lain, sedangkan kalau gagal, tidak gagal sendirian).

Pak Marijan memberikan keterangan menarik ketika menceritakan keberadaan jarak pagar yang hingga kini masih dibiarkan tumbuh di sekitar lahan yang digarapnya. Dia mengatakan bahwa pohon jarak yang berada di pinggir-pinggir jalan utama dibiarkan tetap tumbuh, dan tidak dibabat karena ditujukan untuk memberikan bukti kepada pemerintah bahwa penanaman jarak pagar pada masa lalu memang sudah dijalankan dengan baik dan tetap dipelihara hingga kini. Dengan demikian pemerintah akan memberikan kepercayaan pada pemerintah sehingga akan ada lagi proyek-proyek lain masuk ke desa. Sementara itu mbah Giyar bercerita bahwa dia sengaja masih membiarkan pohon jarak pagar tetap tumbuh di beberapa tempat. Tujuannya agar jika suatu saat pasar biji jarak pagar bangkit kembali dan harganya laku, maka dia sudah punya pohonnya sehingga tinggal merawat agar berbuah. *“pokoke, sesuk nek who jarak kuwi payu, aku sing disik dewe entuk hasil”*. (Pokoknya kalau suatu saat biji jarak laku, aku akan menjadi orang pertama yang mendapatkan hasil).

REFLEKSI

Berbagai serpihan peristiwa yang telah saya uraikan di atas menunjukkan bahwa praktik pembangunan dijalankan oleh negara dalam relasi kuasa yang timpang. Kondisi kemiskinan yang dialami warga di Tepus, Gunungkidul memicu pemerintah untuk memberikan berbagai

proyek dan bantuan bagi warganya agar mereka terlepas derita kemiskinan. Warga dianggap tidak berdaya dan tidak mampu memanfaatkan sumber daya di sekitarnya sehingga harus diatur dan dimobilisasi agar mengalami peningkatan dalam memanfaatkan sumber dayanya.

Apa yang terjadi di Gunungkidul merupakan praktik Pembangunan dijalankan melalui kepengaturan terhadap warga yang merasuk kedalam “tubuh sosial” warga lewat tangan-tangan kekuasaan negara. Kepengaturan itu membentuk suatu keadaan yang secara buatan sedemikian teratur sehingga didorong oleh kepentingan pribadinya yang masing-masing akan berbuat (seolah-olah) seperti yang seharusnya mereka perbuat” (Li, 2012:10). Praktik tersebut seperti yang dialami oleh Suwage. Ketika dirinya melakukan tindakan “sukarela” mengajak warga menanam jarak pagar. Tanpa disadari dirinya telah menjadi tangan-tangan yang berkendak untuk mengatur bahkan melebihi kuasa perusahaan. Pada peristiwa lain, kekikutsertaan petani dalam menanam jarak pagar merupakan bentuk takluknya warga terhadap praktik kepengaturan yang dijalankan oleh negara. Petani turut serta dalam proyek jarak pagar sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap kepengaturan atau “*governmentality*” negara. Bahwa fantasi dan harapan akan tercapainya peningkatan kesejahteraan dapat dicapai ketika mereka membangun relasi dengan negara. Namun pada titik ini sesungguhnya terjadi kondisi yang sebaliknya. Pengembangan jarak pagar yang awalnya ditujukan untuk mengatasi persoalan krisis energi fosil serta kemiskinan, telah bergeser dan men-

jerumuskan warga pada krisis yang lain yaitu hilangnya kemandirian warga dalam mengatasi persoalan hidupnya. Pembangunan yang dijalankan melalui mobilisasi telah gagal mencapai cita-cita mulia yaitu kehidupan warga yang sejahtera, makmur, sentosa. Praktik pembangunan yang dilakukan dengan mobilisasi warga menjadikan para petani semakin tergantung untuk diatur karena mereka menjadi orang-orang yang mengarpakan datangnya bantuan dan proyek selanjutnya. Peyelesaian persoalan krisis energi tidak diselesaikan melalui munculnya kedaratan kritis yang mendorong munculnya gerakan sosial namun dilakukan melalui mobilisasi dan dominasi kuasa negara yang menyapakan kesadaran kritis itu. Apa yang dialami oleh Suryanto yang akhirnya turut serta menanam jarak pagar meskipun di awal dia tidak berminat, menunjukkan bahwa warga melakukan penyerahan total terhadap kepengaturan negara atas alasan kolektivitas di tingkat komunitas. Bahkan ketika harapan datangnya perbaikan telah kandas, warga masih saja berfantasi bahwa harapan akan datang, entah kapan.

Uraian dalam tulisan ini mungkin bisa menjelaskan mengapa pengembangan jarak pagar di Gunungkidul (juga di banyak tempat lainnya) gagal total.

DAFTAR PUSTAKA.

Afiff, Suraya. 2014 (a). Engineering the Jatropha Hype in Indonesia. *Sustainability* 6, 1686-1704; doi:10.3390/su6041686.

-----, 2014 (b). How did the idea of using Jatropha for biofuel emerge in Indonesia?. <http://jarak.iias.asia/how-did-the-idea-of-using-jatropha-for-biofuel-emerge-in-indonesia/> accessed 4/23/16 9:26AM.

Amir, S. et al. 2008. Cultivating Energy, Reducing Poverty: Biofuel development in an Indonesian Village. *Perspectives on Global Development and Technology*, 7:2 113-132.

Boomgaard, P. 1999. "Maize and Tobacco in Upland Indonesia, 1600-1940" dalam Tania Li (ed) *Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power and Production*. Harwood Academic Publishers, Canada.

Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Terjemahan Monique Susman. Djambatan, Jakarta.

Brittaine, R., Litaladio, M. 2010. Jatropha: a Smallholder Bioenergy crop. *The Potential for Pro-poor Development. Integrated Crop Management*, vol. 8. IFAD, Rome.

Franco, Jennifer, Levidow, Les, Fig, David, Goldfarb, Lucia, Hönicke, Mireille and Luisa Mendonça, Maria (2010). Assumptions in the European Union biofuels policy: frictions with experiences in Germany, Brazil and Mozambique. *Journal of Peasant Studies*. 37: 4, 661-698.

Gunawan, 2014. <http://jarak.iias.asia/what-was-the-link-between-jatropha-projects-and-rural-poverty-reduction->

in-gunungkidul-yogyakarta-province/
accessed: 11/24/15 11:34 AM.

_____ 2014. Why and how did farmers
in Gunungkidul, Yogyakarta,
participate in Jatropha projects?
[http://jarak.iias.asia/why-and-how-
did-farmers-ingunungkidul-
yogyakarta-participate-in-jatropha-
projects/](http://jarak.iias.asia/why-and-how-did-farmers-ingunungkidul-yogyakarta-participate-in-jatropha-projects/). Accessed 11/24/2015, 11.08
AM.

Kloppenburg, J.M.C. (N/A) <[http://www.semarang.nl/jamu/articles.php?lng=nl
&pg=506](http://www.semarang.nl/jamu/articles.php?lng=nl&pg=506)> (accessed 11 Juni 2013).

Li, Tania Murray. 2012. "Pendahuluan:
Kehendak untuk Memperbaiki,"
dalam *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, Tania Murray Li. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, hlm. 1–56.

Mulyani Anny. 2008. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* Vol. 30, No. 4.

Wilkinson, John and Herrera, Selena, 2010 'Biofuels in Brazil: debates and impacts', *Journal of Peasant Studies*, 37: 4, 749-768.